

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

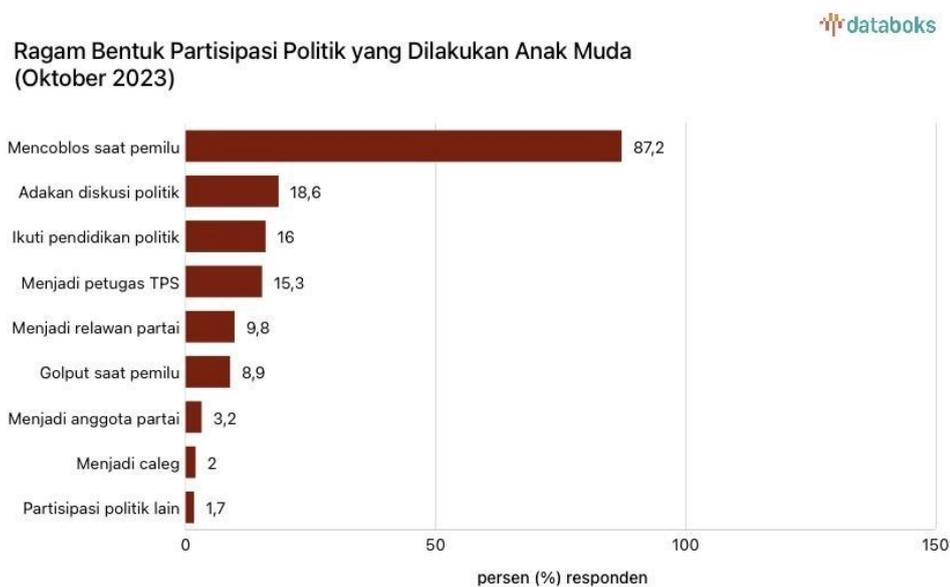
Pemilihan Presiden merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan arah kebijakan nasional. Pemilihan Presiden tahun 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin negara, tetapi juga kesempatan memperkuat tingkat partisipasi politik dikalangan pemuda untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan tindakan atau kehidupan politik yang dilakukan secara aktif oleh seseorang atau sekelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dimana tindakan tersebut dapat memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008). Pada pemilihan Presiden 2024 kemarin, terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan nomor urut 01 adalah Anies Baswedan dan Muhaimin, pasangan nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan nomor urut 03 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Pemilihan Presiden tahun 2024 menjadi momen penting bagi pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. KPU RI menyatakan bahwa 55% pemilih pada pemilihan Presiden tahun 2024 berasal dari generasi Z dan Millennial (Sutrisno, 2024). Sehingga, keikutsertaan pemuda dalam Pilpres sangat krusial, mengingat mereka merupakan generasi yang akan menghadapi dampak dari keputusan politik yang diambil hari ini. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemuda agar mereka dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Rusadi Kantaprawira menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politiknya, seperti memahami demokrasi atau kedaulatan rakyat (Kantaprawira, 2021).

Alasan pendidikan politik itu penting untuk dilakukan adalah permasalahan akut yang terjadi mulai dari berakhirnya era orde baru dan memasuki masa reformasi dimana partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam dunia politik menampakkan tanda-tanda penurunan kualitas dan kuantitas dari sisi keaktifan/partisipasi politik. Dalam konteks pemilihan Presiden, tingkat partisipasi warga tidak pernah sampai pada angka 85-90% (Jauhari, 2023). Hal ini membuktikan bahwa ada sebagian besar warga negara yang tidak tahu, apatis, maupun kecewa terhadap pelaksanaan pemilu maupun kecewa terhadap figur-figur yang tidak mampu membawa kesejahteraan bagi kehidupan mereka.

Dilansir dari data yang dirilis oleh survey databoks, dimana data tersebut menunjukkan bahwa dari 50,4% gen Z dan 49,6% millennial, hanya 16% yang mengikuti pendidikan politik. Menariknya, 87,2% dari mereka menyatakan ingin berpartisipasi dalam pencoblosan saat pemilu (Annur, 2023).

Gambar 1.1 Bentuk Partisipasi Politik Anak Muda



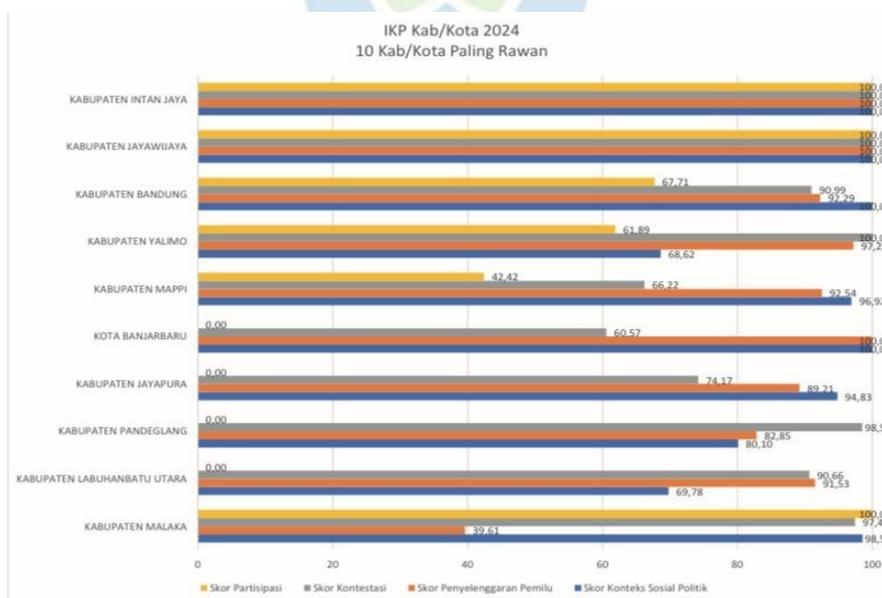
Sumber:
Katadata Insight Center (KIC)

Informasi Lain:

Minimnya pendidikan politik dikalangan pemuda menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun mereka menunjukkan keaktifan dalam mengikuti pemilihan Presiden, hal ini menciptakan jurang antara partisipasi dalam proses politik dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu politik yang dihadapi. Permasalahan lain yang cukup laten adalah permasalahan politik uang dalam proses pemilihan yang demokratis, dugaan jual beli jabatan hingga jual beli posisi calon kepala daerah oleh partai politik.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami permasalahan rendahnya partisipasi politik. Pasalnya, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, Kabupaten Bandung termasuk daerah dengan kategori rawan. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menyebutkan ada 4 dimensi dalam IKP yang terdiri dari konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Gambar 1.2 10 Kab/Kota Paling Rawan Dimensi Sosial Politik



Sumber Gambar: (Bawaslu, 2023)

Dilihat dari konteks sosial politik Kabupaten Bandung berada di peringkat 3 nasional kerawanan tertinggi, sedangkan jika dilihat dari partisipasinya

skornya lebih kecil hanya 67,71% atau berada di tingkat 11. Faktor penyebab yang menjadikan Kabupaten Bandung termasuk kategori rawan tinggi ini lantaran dari 61 indikator, Kabupaten Bandung hanya menyertakan buktinya sebanyak 29 indikator. Hedi menjelaskan bahwa indikator menyusun dimensi agregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi (Humas Jabar, 2022).

Menurut ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menjelang pemilihan Presiden tahun 2024 kemarin, masyarakat Kabupaten Bandung banyak mendapat serangan fajar berupa amplop yang berisi uang dengan pecahan uang yang bervariasi antara Rp.20.000, Rp. 50.000 hingga pecahan Rp. 100.000. Politik uang juga dapat berupa pemberian sembako seperti minyak atau bentuk sembako lainnya. Hal tersebut bermaksud sebagai ajakan untuk memilih calon tertentu (Yulianto, 2023).

Tingkat antusiasme masyarakat dan pemuda yang rendah terhadap politik, kasus-kasus politik uang, serta apatisme terhadap peristiwa-peristiwa politik di negara kita khususnya di Kabupaten Bandung menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan politik. Partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik yang baik malah menjadi sumber gagalnya pendidikan politik itu sendiri. Sehingga, pendidikan politik sangatlah penting bagi warga maupun pemuda di Kabupaten Bandung agar bisa berpartisipasi aktif dan memiliki tanggung jawab terhadap proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, agar pemuda dapat lebih memahami bagaimana proses politik berjalan dan bagaimana politik dapat menentukan pembagian kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan kebijakan. Semua itu bisa terwujud jika terdapat partisipasi politik yang aktif dari masyarakat bersamaan dengan pemahaman politik yang baik.

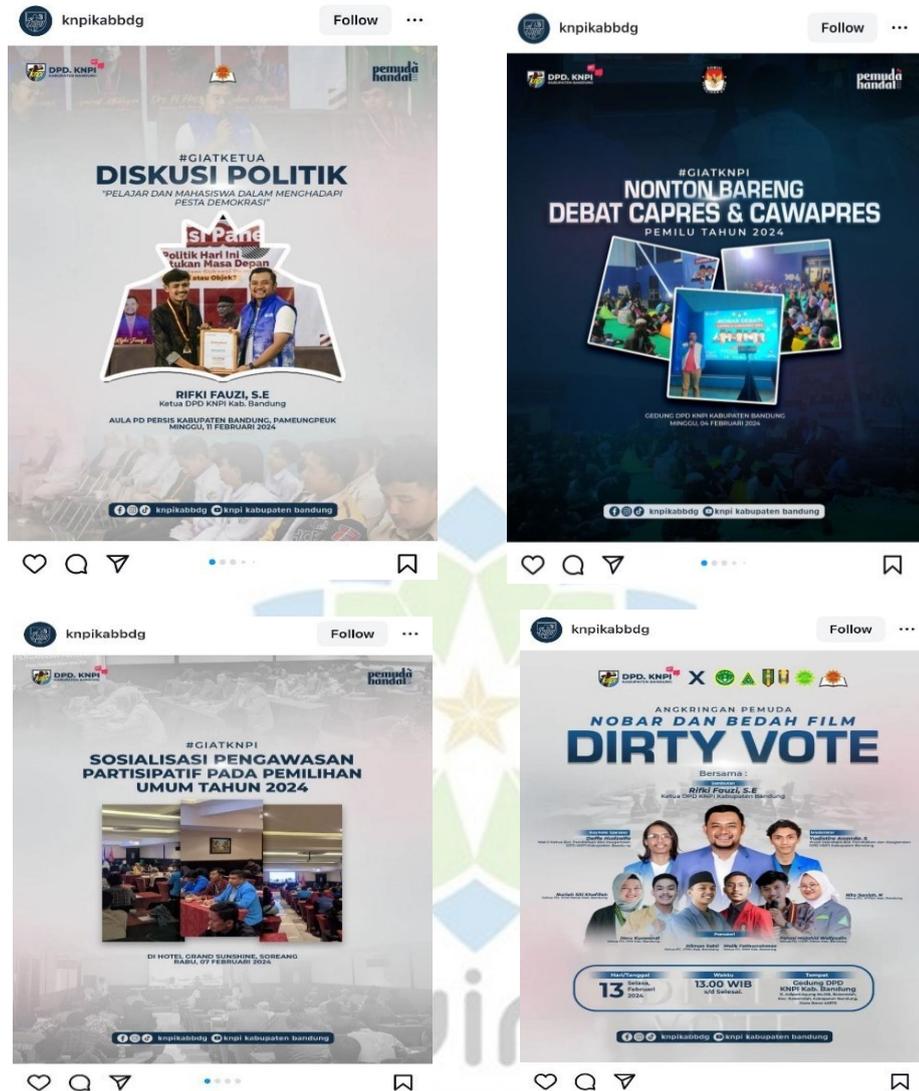
Salah satu diantara terjadinya proses pendidikan politik bagi warga dan pemuda adalah melalui wadah organisasi kemasyarakatan maupun organisasi

kepemudaan. Dalam hal ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan pendidikan politik baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama di kalangan pemuda.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan sebuah organisasi yang menghimpun berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) di Indonesia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 7 ayat 3 AD/ART KNPI, dinyatakan bahwa salah satu peran organisasi ini adalah “sebagai sarana perjuangan pemuda Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, status, dan kesejahteraan sosial, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur”. KNPI berupaya menampung aspirasi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang tercermin dalam beragam kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Aktivitas tersebut mencakup diskusi, seminar, dan dialog dengan pemerintah, serta bentuk aksi langsung seperti melobi para pejabat, membangun jaringan strategis, dan melakukan demonstrasi di kantor-kantor pemerintah seperti DPR atau DPRD. Semua ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih responsif (KNPI, 2023).

Seperti apa yang telah dilakukan oleh KNPI Kabupaten Bandung menjelang pemilihan Presiden Tahun 2024 kemarin, dimana KNPI Kabupaten Bandung beberapa kali mengadakan kegiatan sosialisasi dan diskusi politik, seperti diskusi politik, bedah film *dirty vote*, sosialisasi dan implementasi peraturan bawaslu dan produk hukum pada tahapan kampanye pemilu serentak, serta nonton bareng debat capres dan cawapres. Agenda kegiatan tersebut diunggah pada akun Instagram resmi KNPI Kab. Bandung (@knpikabbdg), dimana salah satu fungsi dari akun Instagram tersebut diharapkan dapat menjadi sarana dalam memberikan pendidikan politik baik di kalangan pemuda maupun anggota KNPI itu sendiri.

Gambar 1.3 Ragam Giat KNPI Menjelang Pilpres 2024



Sumber Gambar Instagram @knpikabbdg

Dalam pelaksanaan peran tersebut pemuda tidak hanya berbekal semangat dan kerja keras, namun pemahaman mengenai politik itu sendiri harus dimiliki oleh setiap generasi muda di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti meyakini bahwa peran KNPI Kabupaten Bandung sebagai wadah organisasi kepemudaan di Kabupaten Bandung dapat memersatukan kekuatan-kekuatan muda. KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang bertujuan meningkatkan potensi pemuda khususnya pemahaman politik, dalam mensosialisasikan politik agar mudah dipahami dan meningkatkan partisipasi pemuda untuk berpartisipasi aktif. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis peran politik KNPI sebagai sarana pendidikan pemuda dalam pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan strategi politik yang lebih baik dan untuk memahami lebih dalam bagaimana organisasi pemuda dapat berperan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang sudah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024?
2. Apa saja faktor penghambat Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam memberikan pendidikan politik pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam memberikan pendidikan politik pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori mengenai pendidikan dan partisipasi politik di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini secara lebih mendalam. Penelitian ini juga diharapkan akan ada upaya yang lebih baik dalam

memperkuat demokrasi dan partisipasi politik di masa depan dan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi politik, serta organisasi kepemudaan lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk memberikan pendidikan politik di kalangan pemuda.

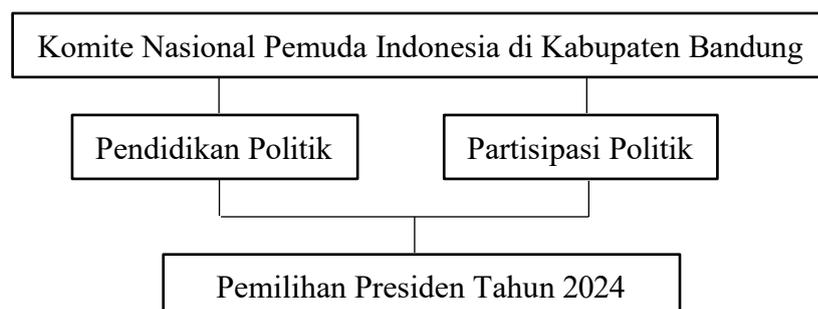
- b. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas program-program kepemudaan dalam konteks politik yang lebih luas, serta untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan solusi untuk masalah yang diteliti.
- b. Memberikan gambaran lebih detail tentang bagaimana peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kabupaten Bandung pada pemilihan Presiden tahun 2024.
- c. Sebagai sumber tambahan pengetahuan dan referensi untuk dipelajari lebih lanjut, terutama oleh mahasiswa program studi ilmu politik.
- d. Memberikan kontribusi akademis kepada anggota KNPI Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



Alur penelitian ini dimulai dengan pengenalan pentingnya pendidikan politik bagi pemuda dalam mendukung demokrasi dilanjut dengan memaparkan permasalahan kualitas pendidikan politik di Indonesia. Dalam konteks ini, KNPI berperan sebagai organisasi yang berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemuda, terutama menjelang pemilihan Presiden tahun 2024. Selanjutnya, penelitian ini merumuskan fokus pada bagaimana KNPI melaksanakan program-program pendidikan politik dan kegiatan yang dapat mendorong pemuda untuk terlibat aktif dalam proses politik. Sehingga, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara dan observasi terhadap kegiatan KNPI. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep pendidikan politik dan partisipasi politik yang menggarisbawahi hubungan antara pengetahuan politik dan keterlibatan pemuda. Penelitian ini kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk menilai peran KNPI sebagai sarana pendidikan politik pemuda dalam pemilihan Presiden tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai kontribusi KNPI dalam membentuk pemuda yang sadar politik dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, alur pemikiran ini menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang posisi KNPI sebagai sarana pendidikan politik pemuda.